

A black and white photograph showing a person's hands on the handlebars of a wheelchair. The wheelchair is positioned on a set of stone steps. In the background, another person's legs and feet are visible, suggesting a public or outdoor setting. The overall scene conveys a message of accessibility and mobility.

LAPORAN PEMETAAN INOVASI PRB INKLUSIF DI INDONESIA



elrha

START
NETWORK



Inspire
Indonesia

LAPORAN PEMETAAN INOVASI PRB INKLUSIF DI INDONESIA



elrha

START
NETWORK



Inspire
Indonesia

Tentang

Laporan ini disusun sebagai bagian dari kolaborasi U-INSPIRE Indonesia dengan YEU dalam kegiatan Community-led Innovation Partnership (CLIP). U-INSPIRE adalah platform pemuda dan profesional muda dalam sains, teknologi, dan inovasi untuk pengurangan risiko bencana. Platform ini terbentuk pertama kali di Indonesia pada tahun 2018 dan sekarang telah berkembang di beberapa negara.

Ucapan Terima Kasih

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada Mas Wiwit, Mas Edo, Mas Irul, Pak Danang, Mbak Rani, dan Bu Susi atas waktu, ilmu dan kontribusinya dalam pemetaan inovasi ini. Kami juga berterima kasih kepada YEU dan mitra atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk belajar dalam proses ini.

Penyusun Laporan (urut abjad):

Nurul Sri Rahatiningtyas

Risye Dwiyani

Said Fariz Hibban

Saska Shafira Rizkia

Gambar Sampul:

Canva

Daftar Isi

A. Pengantar	1
B. Ruang Lingkup	3
C. Hasil Pemetaan	8
Pihak yang Berperan	26
Perjalanan Waktu Pengembangan Inovasi PRB Inklusif	27
Referensi	28

Glossary

ASB	Arbeiter Samariter Bund	PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pergub	Peraturan Gubernur
BPN	Badan Pertanahan Nasional	PRB	Pengurangan Risiko Bencana
BNPB	Badan Informasi Geospasial	PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
CBM	Christoffel Blinden Mission	RW	Rukun Warga
CLIP	Community-led Innovation Partnership	SAPDA	Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak
COVID-19	Corona Virus Disease 2019	SHM	Sendai Framework of Disaster Risk Reduction
DIFAGANA	Difabel Siaga Bencana	SID	Science Technology Action Group
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta	SIPAKDEDIFA	Sistem Pembelajaran Kebencanaan dengan E-Learning untuk Difabel
HHOT	Humanitarian Hands-on Tools	SMAB	Sekolah Madrasah Aman Bencana
LIA	Local Innovator Advisor	SPAB	Satuan Pendidikan Aman Bencana
LIDI	Layanan Inklusif Disabilitas	UC-PRUK	United Cerebral Palsy Roda Untuk Kemanusiaan
M3K	Mundur Munggah Madep Kali	WVI	World Vision Indonesia
Musrenbang	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan	YEU	Yakkum Emergency Unit
OPDis	Organisasi Penyandang Disabilitas		



A. Pengantar

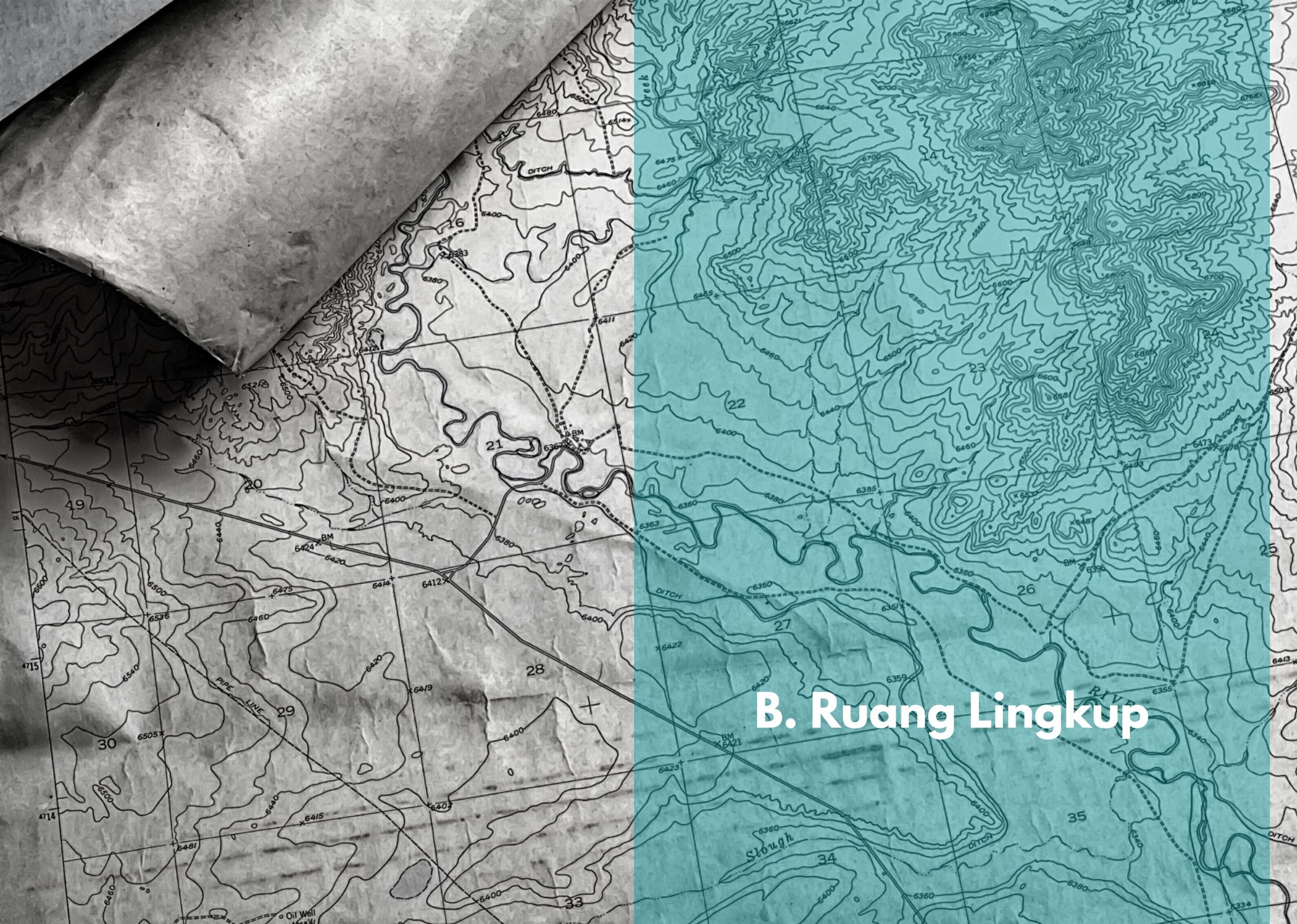
Latar Belakang

Provinsi DI Yogyakarta memiliki dua belas potensi ancaman bencana yang berisiko dari skala sedang hingga tinggi. Provinsi ini memiliki jumlah lansia tertinggi di Indonesia serta jumlah penyandang disabilitas tertinggi keempat di Indonesia. Keadaan tersebut menuntut partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dalam menyaingi tantangan yang ada di kemudian hari yang tidak hanya bertumpu pada satu lembaga pemerintah terkait termasuk kelompok masyarakat rentan yang memiliki risiko tinggi saat terjadi bencana. Berdasarkan hasil survey dan diskusi terbatas yang dilakukan oleh YEU menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kebencanaan masih di bawah 30%. Sehingga kebutuhan terobosan yang inklusif berupa inovasi dalam kebencanaan di DIY dari masyarakat/komunitas setempat menjadi cukup mendesak. Inovasi yang inklusif diharapkan bisa membantu kelompok rentan untuk terlibat aktif dalam penanggulangan bencana sekaligus membantu mengatasi hambatan mereka dengan kreatif.

YAKKUM Emergency Unit (YEU) dengan dukungan dari Elrha dan Start Network menyelenggarakan proyek “Community-led Innovation Partnership” atau CLIP dari April 2020 hingga Maret 2023. Proyek ini berkomitmen untuk mendukung para inovator di tingkat komunitas untuk menghasilkan, menguji, dan mengembangkan solusi terhadap prioritas masalah yang dihadapi dalam proses tanggap kedaruratan dan kesiapsiagaan bencana, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai Local Innovation Advisor (LIA), U-INSPIRE Indonesia mengemban tugas seputar pemberian saran atau dorongan, pemetaan inovasi eksisting, pendokumentasian proses dan pembelajaran. Berikut ini domain pekerjaan yang akan dilaksanakan LIA dan outputnya, sesuai yang tertera di MoU YEU - U-INSPIRE Indonesia: (1) Domain 1. Pengembangan tools penilaian, (2) Domain 2: Pemetaan inovasi yang sudah ada, dan (3) Domain 3: Proses pengembangan inovasi bersama Inovator Lokal. Laporan ini dikhususkan untuk kegiatan Domain 2: Pemetaan inovasi yang sudah ada.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran inovasi kebencanaan yang menerapkan prinsip inklusivitas yang sudah ada di Indonesia. Hasil pemetaan inovasi ini akan digunakan sebagai acuan dalam menilai kebaruan inovasi yang diusulkan calon inovator lokal.



B. Ruang Lingkup

Definisi dan Fokus

Inovasi yang dipetakan yaitu produk maupun pendekatan pengurangan risiko bencana inklusif yang pernah dikembangkan di Indonesia. Inovasi yang dimaksud dapat berupa upaya yang telah diadopsi dan diterapkan secara berkelanjutan, ataupun yang baru mulai dikembangkan. Sebagai negara yang sering dilanda bencana, berbagai inovasi produk dan pendekatan pengurangan risiko bencana cukup banyak berkembang di Indonesia. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah – apakah upaya-upaya tersebut telah memastikan tidak satupun orang tertinggal, baik dalam proses pengembangannya maupun sebagai penerima manfaatnya?

Inklusi sosial merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan, membuka kesempatan dan mengembalikan martabat individu/kelompok yang sebelumnya dirugikan akibat atribut identitas yang menghambat keterlibatan dan partisipasi aktif dalam masyarakat (World Bank, 2013). Atribut identitas yang dimaksud dapat berupa gender, disabilitas, etnis minoritas, agama, status sosial ekonomi atau identitas tertentu lainnya. Sehingga, inovasi pengurangan risiko bencana inklusif yang dimaksud dalam kegiatan pemetaan ini adalah produk atau pendekatan dengan nilai tambah baru dari yang pernah ada sebelumnya dalam menanggulangi bencana dengan meningkatkan keterlibatan dan akses pihak tertentu yang biasanya ‘tertinggal’ atau termarjinalkan. Dalam konteks ini, pihak yang termarjinalkan kemudian diistilahkan sebagai kelompok rentan, karena berisiko lebih tinggi terdampak oleh bencana. Kelompok rentan yang dipetakan tidak terbatas pada penyandang disabilitas saja.

Fokus inovasi yang dipetakan utamanya adalah inovasi yang lahir khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak bencana gempa bumi tahun 2006 hingga saat ini. Namun, dengan terbatasnya inovasi yang dimaksud, tim pemetaan memperluas cakupan wilayah studi. Secara konten, inovasi dapat bersifat ilmiah maupun berdasarkan kearifan lokal untuk pengurangan risiko bencana dan risiko perubahan iklim.

FOCUS



Pemetaan inovasi dilakukan melalui tiga kegiatan utama, yaitu pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan hasil pemetaan. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan desk study, pemilihan narasumber untuk diwawancarai, kemudian wawancara narasumber terpilih. Analisis yang dimaksud adalah memahami konten hasil pengumpulan data untuk kemudian dikategorisasi. Bab ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang diterapkan dan kategorisasi hasil pemetaan secara umum.

Sebagai catatan tambahan, mini studi ini dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga tidak dilakukan kunjungan lapangan.

Metode Pengumpulan Data

Desk study. Kegiatan ini dilakukan dengan pencarian inovasi di bidang kebencanaan yang inklusif atau kegiatan terkait inklusi yang memuat materi kebencanaan, dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu pencarian melalui *Google search engine* menggunakan kata kunci seputar 'inklusi', 'pengurangan risiko bencana' dan 'Yogyakarta'. Apabila ada hasil relevan yang berlokasi di luar Yogyakarta, tetap dicatatkan ke dalam daftar hasil pemetaan. Data yang terkumpul berupa tulisan akademik, populer, maupun berita terkait inovasi yang telah dilakukan. Pendekatan kedua yaitu melalui website atau media sosial berbagai lembaga terkait inklusi. Sebelumnya, LIA telah mengumpulkan daftar lembaga yang menggunakan prinsip inklusi di Indonesia, terutama inklusi disabilitas. Tim LIA kemudian menelusuri website dan media sosial dari masing-masing lembaga tersebut untuk mendapatkan informasi kegiatan/program yang dilakukan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.

Wawancara. Wawancara dilakukan secara virtual terhadap beberapa narasumber terpilih selama bulan Mei - Juli 2021. Maksud dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi awal mengenai ekosistem inovasi pengurangan risiko bencana inklusif yang ada di Indonesia maupun pendalamannya. Berdasarkan hasil desk study sementara diperoleh beberapa nama organisasi yang teridentifikasi cukup dominan berkegiatan di bidang PRB yang inklusif. Organisasi-organisasi tersebut kemudian menjadi narasumber wawancara ini. Berikut ini narasumber wawancara untuk pemetaan inovasi:

No	Narasumber	Fokus
1	Wiwit Prasetyono, Try Febri Khoirun, Edo (pegiat inklusi)	Diskusi informal gambaran ekosistem inovasi PRB inklusif di Indonesia
2	Danang Samsu (BPBD DIY)	Wawancara mendalam Inovasi PRB inklusif yang dikembangkan BPBD DIY
3	Rani Sawitri (ASB)	Wawancara mendalam Inovasi PRB inklusif yang dikembangkan ASB
4	Ratna Susi (YEU)	Wawancara mendalam Inovasi PRB inklusif yang dikembangkan YEU

Kategorisasi Hasil Pemetaan Inovasi

Sejumlah inovasi pengurangan risiko bencana inklusif yang teridentifikasi dari desk study dan wawancara dapat berupa produk maupun proses/layanan. Lembaga atau pihak yang menginisiasi masih terbilang sedikit, namun bentuk inovasi cukup beragam dari sisi skala penerapan inovasinya dan dari sisi tahapan penanggulangan bencana yang relevan. Untuk mempermudah pemahaman, inovasi yang teridentifikasi kemudian dikelompokkan menjadi tujuh kategori seperti terlihat pada gambar. Penyajian hasil pemetaan dijelaskan berdasarkan kategori tersebut di bab selanjutnya.





C. Hasil Pemetaan

Peningkatan Kapasitas untuk Ketangguhan Komunitas Sekolah



Peningkatan Kapasitas untuk Ketangguhan Komunitas Sekolah

Upaya peningkatan kapasitas untuk ketangguhan komunitas sekolah telah dipraktikkan berbagai pihak, namun masih ada kelompok yang belum terlibat salah satunya karena faktor aksesibilitas. Beberapa organisasi telah menginisiasi pembangunan budaya aman bencana bagi komunitas sekolah secara lebih inklusif. Inovasi yang telah dikembangkan di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas untuk ketangguhan komunitas sekolah yang inklusif adalah melalui pembekalan kemampuan praktis komunitas sekolah, peningkatan kapasitas kelembagaan sekolah, serta pengembangan berbagai alat pendidikan yang ramah disabilitas. Komunitas sekolah yang dimaksud meliputi siswa, guru, pengawas sekolah, komite sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya PRB di komunitas sekolah didorong pemikiran bahwa penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar saat situasi darurat

Arbeiter Samariter Bund (ASB) merupakan salah satu lembaga yang terus mengembangkan inovasi peningkatan inklusivitas pengurangan risiko bencana sejak tahun 2008, yang dimulai dengan penerapan pendidikan PRB inklusif disabilitas tingkat sekolah di Provinsi DI Yogyakarta. Aksesibilitas menjadi salah satu syarat/kriteria dalam pengembangan produk pengetahuan lembaga ini. Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB), saat ini berkembang menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arbeiter Samariter Bund (ASB) beserta mitra meningkatkan inklusivitas penerapan program ini di 81 sekolah dan empat desa di Kabupaten Magelang. Program ini diselenggarakan dengan meningkatkan kapasitas PRB inklusif terhadap Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan relawan bencana sebagai calon fasilitator SMAB, terhadap tenaga pendidik dan masyarakat, serta mengembangkan jejaring inisiatif PRB inklusif antara sekolah dengan masyarakat. Penerima manfaat dari program ini adalah OPDis, siswa, relawan bencana, OPD, Kepsek, Guru, Pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Upaya ini telah menjadi salah satu contoh praktik baik penerapan SMAB yang inklusif di tingkat nasional.



Gambar 1. Ilustrasi salah satu pelatihan PRB bagi Guru SLB oleh ASB. Photo: ASB Indonesia & the Philippines 2016

Selain ASB, terdapat beberapa individu/kelompok yang turut mengembangkan berbagai alat pendidikan yang lebih inklusif, namun belum diketahui keberlanjutan pemanfaatannya. Anisa Rohmah dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017 menyusun Buku PRB dengan huruf braille untuk memperkenalkan mitigasi bencana bagi Siswa Tunanetra di SLB Negeri Semarang. Sedangkan sekelompok mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyatanya menggunakan berbagai alat permainan yang ramah untuk siswa dengan disabilitas, untuk mempermudah proses penyampaian informasi terkait PRB. KKN tersebut dilaksanakan di Desa Evu, Maluku Tenggara; Desa Payah Senara, Pulau Sabang Aceh; Banjarnegara, Jawa Tengah; dan Kaliadem Cangkringan, DI Yogyakarta.

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan inovasi terkait peningkatan kapasitas ketangguhan komunitas sekolah adalah dalam memastikan keberlanjutannya. Inovasi yang berupa program/layanan membutuhkan komitmen semua pihak untuk menjadikan program/layanan tersebut dapat berjalan secara rutin. Tantangan dalam berinovasi berupa produk seperti Buku PRB berbasis huruf braille adalah memastikan kemudahan dalam penggunaan produk serta perlunya kolaborasi dengan pihak yang dapat memproduksinya secara massal dan mendiseminasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Peningkatan kapasitas seluruh pihak dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang beragam adalah kunci dalam pengembangan program dan produk PRB yang lebih inklusif.



Peningkatan Kapasitas untuk Ketangguhan berbasis Wilayah

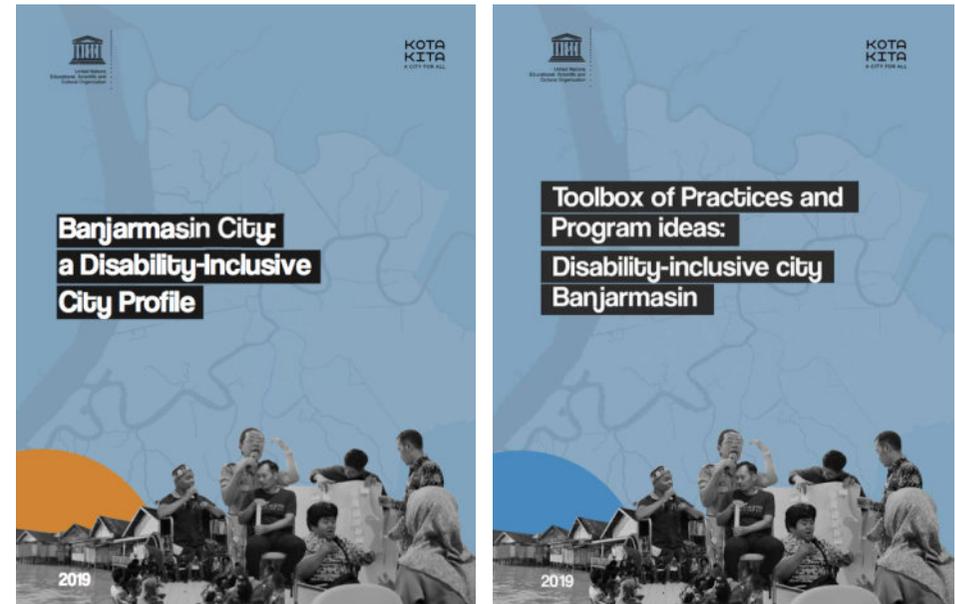


Peningkatan Kapasitas untuk Ketangguhan berbasis Wilayah

Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan salah satu kunci dalam pengurangan risiko bencana. Berbagai program PRB telah banyak diselenggarakan sampai tingkat basis, namun, yang masih sering menjadi pertanyaan adalah: masyarakat yang mana? Dengan sistem kemasyarakatan yang ada, terkadang ada pihak-pihak yang tidak terdata, tidak memiliki akses terhadap program, atau memang tidak dilibatkan. Menjawab permasalahan tersebut, beberapa inovasi yang telah dikembangkan yaitu pembangunan sistem pendataan dan informasi desa yang terpadu, pendataan dan profiling kota inklusif disabilitas, serta pengembangan ketangguhan desa secara inklusif. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan inovasi tersebut adalah dalam memastikan keberlanjutannya, yang biasanya memerlukan kolaborasi dan komitmen banyak pihak.

CRI (Combine Resource Institution) mengembangkan perbaikan tata kelola data dan informasi berbasis masyarakat di tingkat desa di DIY, diawali dengan misi membangun sistem database untuk mempermudah pertukaran alat produksi dan pengetahuan antar petani, yang kemudian pada tahun 2009 dikembangkan menjadi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Terong, Bantul. BPBD DIY mengakui sistem ini sangat bermanfaat di masa krisis, seperti pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, misalnya, memanfaatkan SID Berdaya ini untuk kemudian diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB) untuk mendukung pengambilan keputusan penanganan COVID-19 yang berbasis data yang akurat dan terpadu, salah satunya untuk menentukan kelompok penerima manfaat bantuan sosial.

Masih terkait dengan data, Kota Kita, UNESCO, beserta mitra melakukan penyusunan Profil Kota Inklusif Disabilitas pada tahun 2017 (di Surakarta) dan tahun 2018 (di Banjarmasin). Profil kota ini dikaitkan dengan berbagai aspek layanan kota, termasuk dalam pengurangan risiko bencana. Pembelajaran yang diperoleh melalui kegiatan profiling tersebut didokumentasikan ke dalam Toolbox Praktik dan Ide-ide Program kota inklusif disabilitas. Pendataan penyandang disabilitas memerlukan metode dan teknik tersendiri, mengingat adanya disabilitas yang tidak terlihat secara kasat mata, atau adanya sebagian populasi penyandang disabilitas yang tidak muncul di ruang publik, bahkan disembunyikan oleh keluarga. Metode pendataan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih berbeda antara satu kota dengan lainnya. Pendataan ini penting tidak hanya untuk pengembangan kebijakan yang inklusif, tetapi juga agar proses perencanaan pembangunan lebih inklusif dengan melibatkan penyandang disabilitas itu sendiri.



Gambar 2. Buku Profil Kota Inklusif Disabilitas Banjarmasin dan Toolbox Praktik dan Ide-ide Program. *Photo: UNESCO & Kota Kita*

BNPB melalui Perka BNPB No.1/2012 mencanangkan program Desa Tangguh. Pada tahun 2013, sebagai mitra pemerintah, Arbeiter Samariter Bund (ASB) mengembangkan model Desa Tangguh Inklusif di Desa Hargomulyo, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam model tersebut, RPBDes dan Rencana Aksi Komunitas disusun dengan melibatkan penyandang disabilitas sehingga perencanaan mengakomodasi kebutuhan dan kontribusi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana. Anggota Tim Penanggulangan Bencana dan Forum PRB pun mencakup warga dengan disabilitas maupun non disabilitas. Berdasarkan laporan ASB, beberapa tantangan dari pengembangan Desa Tangguh Inklusif ini adalah (1) dalam menepis asumsi bahwa akan ada kesulitan dalam melibatkan penyandang disabilitas serta adanya rasa 'kasihan', (2) fasilitator perlu lebih peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam, dan (3) pelabelan subyektif terhadap penyandang disabilitas yang dikaitkan dengan bentuk fisik.

Untuk kelompok perempuan, Yakkum Emergency Unit (YEU) mengadakan kegiatan kolektif untuk membangun ketangguhan perempuan dalam masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Suryatmajan dan Terban Provinsi DI Yogyakarta. Aksi kolektif ini meliputi kegiatan-kegiatan yang meningkatkan (1) kesehatan, seperti senam pagi bersama, (2) ketangguhan ekonomi, seperti membuat dan menjual jamu, pemasaran online, (3) ketahanan pangan, seperti budidaya lele dan *urban farming*, yang hasilnya sebagian untuk mendukung kegiatan lansia dan posyandu, dan sebagian lagi diolah dan dijual, (4) lingkungan, seperti pembuatan pupuk, dan pengembangan bank sampah, serta (5) kesiapsiagaan (mis. latihan respon kebakaran di rumah, P3K). Kegiatan ini merupakan kolaborasi dengan Kelompok Perempuan Gempita, Tani Migunani, Srikandi 04, dan Srikaton didukung oleh Huairou Commission, dan pemerintah setempat.



Gambar 3. Cuplikan Video Program Pembangunan Ketangguhan Perempuan di DI Yogyakarta. Photo: YouTube Yakkum Emergency Unit

Peningkatan kapasitas masyarakat juga dapat diinisiasi oleh pengurus Rukun Warga (RW) seperti yang dilakukan di RW 3 Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta dalam gerakan RW Siaga yang menyelenggarakan kegiatan Posyandu lansia dan anak (pemantauan pola hidup sehat warga). Dalam kegiatan tersebut, selain penimbangan juga disisipi kegiatan menarik seperti permainan yang di dalamnya terdapat pengetahuan baru tentang kesehatan. Meskipun inisiasi ini tidak terkait langsung dengan isu kebencanaan, namun dengan meningkatnya dan terpantaunya kesehatan dari masyarakat khususnya lansia dan anak-anak harapannya dapat meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana. Memanfaatkan sistem komunitas terkecil seperti RT dan RW sangat berpotensi membangun sistem kesiapsiagaan yang solid sekaligus mempraktikkan prinsip-prinsip inklusi sosial.

Desain Aksesibilitas Permukiman



Desain Aksesibilitas Permukiman

Beberapa kota besar di Indonesia mulai menerapkan prinsip aksesibilitas universal di ruang-ruang publik kota dan bangunan pelayanan publik. Namun, hal tersebut belum umum diterapkan di skala permukiman, apalagi di hunian sementara, seperti pengungsian. Masalah aksesibilitas di permukiman mengakibatkan tidak semua orang bisa mengakses dengan mudah fasilitas yang ada, seperti toilet, ruang komunal, kegiatan perekonomian, dan tempat yang lebih aman dalam kondisi darurat. Hal ini mengakibatkan beberapa hal, diantaranya (1) peningkatan risiko terdiskriminasi karena tidak dapat mengakses ruang-ruang interaksi warga, dan (2) peningkatan kerentanan terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, serta bencana. Beberapa kawasan di Kalimantan Selatan, DIY, Sulawesi Tengah dan NTB telah mengembangkan inovasi desain permukiman yang lebih inklusif untuk mengurangi risiko bencana.

Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai, dengan air pasang surut yang terkadang menggenangi kampung, dan material bangunan hunian masih banyak didominasi kayu, sehingga risiko kebakaran cukup tinggi. Kampung di RT07/RW01 Kelurahan Alalak Selatan, Banjarmasin, merupakan permukiman bantaran sungai yang sebelumnya menggunakan sungai sebagai 'ruang belakang' rumah, sehingga sampah dan limbah dibuang ke sungai. Aksesibilitas antar rumah dan akses menuju jalan utama kurang baik, sehingga tidak ada jalur yang cocok sebagai jalur evakuasi. Pada tahun 2018, warga setempat melakukan perencanaan kolaboratif untuk peningkatan kualitas permukiman yang difasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh Kementerian PUPR. Hasilnya, warga yang tinggal di bantaran sungai sepakat untuk merelakan rumahnya untuk dimundurkan dan dihadapkan ke sungai, demi mengembalikan fungsi sungai sekaligus meningkatkan kualitas ruang hunian. Ruang dari 19 rumah dipotong sebagian untuk membuka ruang pinggir sungai. Ruang tersebut menjadi jalan titian sekaligus ruang interaksi yang nyaman, yang digunakan antar generasi, termasuk lansia, dan menjadi tempat bermain anak-anak. Selain itu, jalan titian tersebut meningkatkan aksesibilitas dalam kondisi darurat. Semua rumah tersebut kemudian memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga meningkatkan keamanan bermukim. Inovasi model perencanaan serupa juga dilakukan secara cukup masif di Kota Yogyakarta, yang dikenal dengan M3K (mundur, mungah, madep kali).



Gambar 4. Rumah Muka Dua di Alalak Selatan, Banjarmasin. Membuka akses di belakang rumah untuk ruang interaksi, yang berpotensi untuk meningkatkan aksesibilitas jika terjadi kondisi darurat. Kondisi rumah-rumah tersebut sebelumnya terlihat seperti rumah-rumah yang berada di sisi sebelah kanan. *Photo: Risy Dwiyani.*

Penyediaan pengungsian yang layak dan aksesibel juga perlu diperhatikan dalam kondisi tanggap darurat. Pasca erupsi Gunung Merapi di penghujung tahun 2021, Yakkum Emergency Unit (YEU) bersama mitra melakukan audit aksesibilitas di pengungsian Glagaharjo, Sleman. Beberapa temuannya adalah, MCK umum belum aksesibel bagi pengguna kursi roda, serta tempat tidur belum ramah bagi lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas. Mekanisme audit aksesibilitas ini penting untuk dilakukan di ruang-ruang sementara seperti pengungsian, namun hal tersebut belum menjadi standar operasional yang dilakukan setiap institusi yang mengadakan ruang pengungsian.

Pasca bencana menjadi momen pembangunan kembali yang lebih baik. YEU pun mengupayakan pembangunan kembali hunian yang lebih aksesibel, sehat, dan aman pasca bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. YEU menyadari bahwa tukang memegang peran penting dalam pelaksanaan konstruksi. Namun, standar yang ditentukan pemerintah seringkali belum terkomunikasikan ke tukang bangunan. Sehingga, sebelum pelaksanaan, tukang bangunan lokal dilatih terlebih dahulu tentang pengetahuan dan keahlian konstruksi bangunan yang aman, sehat, dan aksesibel. Di Sulawesi Tengah, sampai dengan akhir 2020, YEU bersama ACT Alliance telah melatih 242 tukang lokal.

Gambar 5. Uji Sertifikasi Tukang Kayu dan Aplikator Tukang Pemasangan Baja Ringan.

Photo: Yakkum Emergency Unit



Tantangan desain aksesibel adalah ketersediaan lahan dan penyesuaian desain dengan kondisi penyandang disabilitas yang beragam. Di Nusa Tenggara Barat, YEU telah membangun 201 toilet ramah disabilitas, 100 diantaranya didesain menyesuaikan dengan jenis disabilitas dan ketersediaan lahan. Proses berinovasi terjadi melalui kolaborasi relawan arsitek dengan calon pengguna dengan melihat konteks kondisi lapangan. Dengan demikian, penyintas bencana dengan jenis disabilitas yang berbeda-beda dapat memanfaatkan toilet dengan nyaman.

Gambar 6.
Contoh toilet bagi penyandang disabilitas yang dibangun
pasca gempa, NTB.

Photo: Yakkum mergency Unit



Meskipun telah ada beberapa peraturan nasional terkait aksesibilitas termasuk panduannya, namun seringkali sulit diterapkan ketika dihadapkan dengan kondisi lapangan (mis. lahan sempit). Untuk mengembangkan inovasi-inovasi tersebut, diharapkan ada pendokumentasian *know-how* praktik baik dan petunjuk praktis menyelenggarakan hunian dengan desain yang aman dan aksesibel bagi semua. Hal tersebut dapat membantu para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, kontraktor, dan masyarakat untuk menerapkan prinsip inklusi serta aksesibilitas universal dalam pembangunan permukiman.

Kerangka hukum terkait aksesibilitas:

1. Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

Pengembangan Kelembagaan



Pengembangan Kelembagaan

Fungsi dari pengembangan kelembagaan dalam konteks ini yaitu meningkatkan kinerja dan kualitas suatu lembaga dalam meningkatkan ketangguhan terhadap bencana sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Salah satu strategi pengembangan kelembagaan yang diterapkan beberapa organisasi adalah dengan melibatkan secara langsung penyandang disabilitas dalam setiap programnya. Sebagai contoh, pada tahun 2017 pemerintah provinsi Jawa Tengah membentuk Unit Layanan Inklusif Disabilitas (LIDI) BPBD Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam PRB, serta mendukung pelaksanaan program PRB yang inklusif disabilitas, sesuai Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014.

Di tingkat basis, terdapat Taruna Siaga Bencana (Tagana), yaitu relawan masyarakat untuk urusan penanggulangan bencana, seperti yang diatur dalam Permensos No.28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tagana. Untuk memastikan penanggulangan bencana tingkat basis ini inklusif, pada tahun 2019 Dinas Sosial DIY mengukuhkan Difabel Siaga Bencana (DIFAGANA), beranggotakan penyandang disabilitas, yang akan bermitra dengan Tagana.

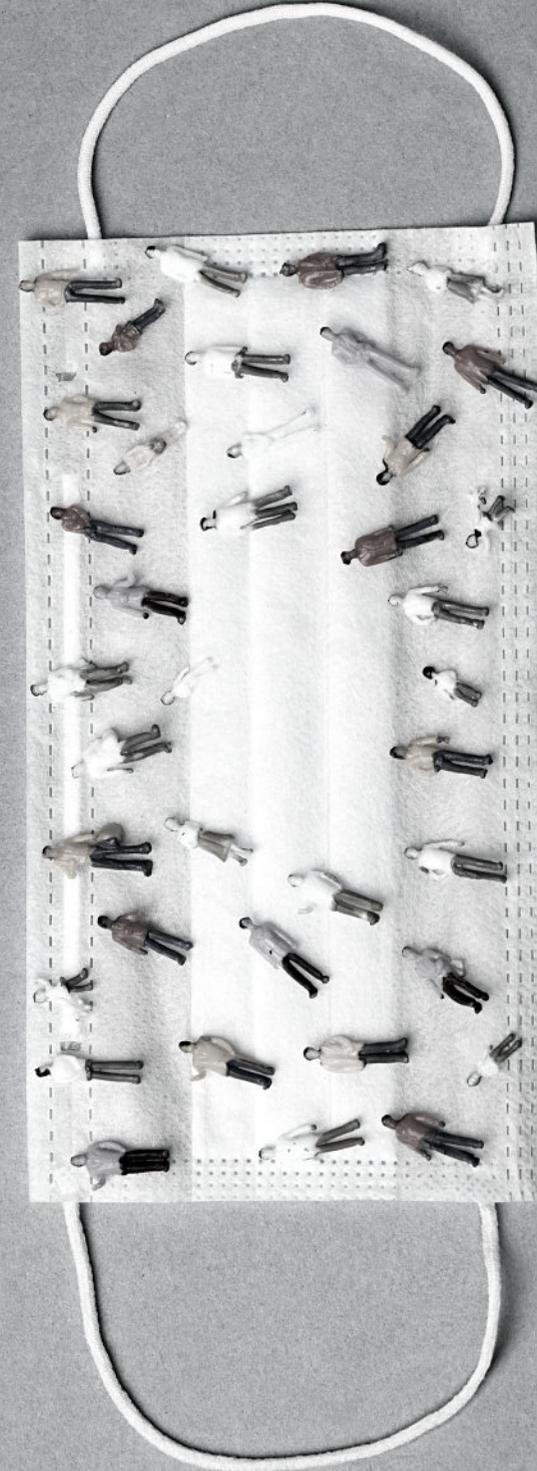
Contoh lainnya adalah pelibatan anak dalam advokasi pembangunan wilayahnya. Pada tahun 2018, Wahana Visi Indonesia beserta mitra mengembangkan Forum Anak di desa-desa di Sigi, Palu, dan Donggala, Sulawesi Tengah. Program ini dilakukan pasca bencana dengan penerima manfaat anak-anak yang telah mengalami trauma akibat kekerasan fisik maupun kekerasan seksual (verbal/ non verbal). Tujuan dari program ini yaitu menghilangkan trauma pada anak dan dapat menjadi sebuah aspirasi dalam forum desa agar dapat menjadikan masukan program prioritas dalam Musrenbang desa. Kelebihan dari lembaga atau program yang melibatkan secara langsung perwakilan kelompok rentan adalah mempermudah keterbukaan informasi dan kebutuhan yang sedang dialami sehingga akan lebih tepat sasaran.



Gambar 7.
Penguakuan DIFAGANA DIY pada tahun 2019. Photo:
Homepage Dinas Sosial DI Yogyakarta

Urusan kesehatan seperti pandemi juga termasuk urusan penanggulangan bencana, sehingga penguatan kelembagaan dalam urusan kesehatan juga berpengaruh pada ketangguhan. Sistem kesehatan yang inklusif dapat berpotensi meningkatkan ketangguhan kelompok rentan dalam menghadapi bencana terkait kesehatan. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah provinsi DI Yogyakarta menetapkan Pergub DIY No. 50 tahun 2017 tentang Sistem Jamkesus Penyandang Disabilitas. Secara praktik, pendampingan Layanan Jamkesus Disabilitas pernah dilakukan oleh UC-PRUK (United Cerebral Palsy Roda Untuk Kemanusiaan) pada tahun 2017 di Pendowoharjo, Kabupaten Bantul. Manfaat dari program ini yaitu meningkatnya ketangguhan komunitas dalam bidang kesehatan dengan penerima manfaat penyandang disabilitas.

Dalam penanggulangan pandemi COVID-19, BPBD DI Yogyakarta meningkatkan sistem pendataan yang terintegrasi melalui aplikasi PUSKOVID DIY. Aplikasi ini memuat data perkembangan COVID-19 di tingkat desa, diwakilkan oleh satu orang untuk menjadi administrator. Aplikasi ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi platform yang dapat mengoleksi data mengenai kelompok rentan (anak-anak, lansia, perempuan, penyandang disabilitas).



Komunikasi dan Diseminasi Informasi



Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Komunikasi dan diseminasi informasi yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam pengurangan risiko bencana yang efektif. Sebagai contoh yang tidak asing bagi masyarakat, alat tradisional bernama 'kentungan' yang sebetulnya merupakan alat untuk komunikasi dan diseminasi informasi secara cepat dalam menyikapi situasi darurat sehingga masyarakat dapat dimobilisasi ke tempat evakuasi. Salah satu penerapannya di masa kini sudah menjelma dalam bentuk teknologi lain seperti melalui siaran radio, televisi, walkie talkie warga setempat, atau grup WhatsApp. Tidak hanya dalam situasi kesiapsiagaan, komunikasi dan diseminasi informasi di masa sedang tidak ada ancaman bencana, tentu menjadi momen yang tepat dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan terkait ancaman yang akan dihadapi, bagaimana memitigasinya, serta tahapan yang perlu dilakukan ketika ancaman akan datang sehingga risiko kerugian pun dapat diminimalisasi.

Penggunaan bahasa dan alat menjadi penentu keberhasilan dalam komunikasi dan diseminasi informasi, terutama jika sasaran cukup beragam dari berbagai aspek, seperti budaya, kebiasaan, keragaman jenis disabilitas, dll. Salah satu contoh inovasi inklusif dalam ranah komunikasi yaitu pembuatan masker transparan untuk teman Tuli yang membantu memudahkan komunikasi di situasi pandemi COVID-19 sejak 2020. Pembuatan masker ini diinisiasi oleh Dwi Rahayu Febuarti dan telah diterapkan di Sleman, DI Yogyakarta pada bulan April tahun 2020. Dwi terdorong untuk membuat masker ini karena merasa kesulitan berkomunikasi dengan orang lain dengan mulut tertutup masker, sedangkan penggunaan masker sangat penting untuk keselamatan. Selama tujuh bulan pertama, Dwi telah memproduksi lebih dari 2000 masker dengan pesanan dari berbagai wilayah di Indonesia. Masker ini juga dapat diterapkan dalam kondisi bencana kebakaran atau erupsi gunung berapi agar tetap dapat berkomunikasi dalam kondisi yang berpolusi.



Gambar 8. Masker transparan untuk teman Tuli oleh Dwi Rahayu Febuarti. Photo: BBC News Indonesia, April 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52370647>

Mengenai alat komunikasi risiko bencana, opsinya sudah banyak berkembang di Indonesia, mulai dari penggunaan media sosial, radio komunitas, sampai dengan permainan (mis. board game) untuk bermain sambil belajar dengan keluarga/komunitasnya. Hanya saja, terkadang alat tersebut kurang sensitif terhadap kelompok tertentu yang sulit untuk mengaksesnya. Misalnya, tidak semua masyarakat bisa mengakses media sosial, atau, teman Tuli akan sulit mengikuti radio komunitas. Sehingga perlu dipikirkan fitur aksesibilitas dari setiap alat komunikasi risiko tersebut. Alat komunikasi risiko yang pernah dikembangkan untuk tuna netra adalah maket bangunan dengan panduan huruf Braille agar terinformasikan jalur evakuasi dan titik kumpul saat kondisi darurat. Maket ini dikembangkan oleh mahasiswa UGM dalam kegiatan kuliah kerja nyata. Model seperti ini berpotensi menjadi inovasi produk komunikasi jika dilakukan evaluasi bersama pengguna untuk dikembangkan lebih lanjut.

Platform Daring untuk Penyandang Disabilitas



Platform Daring untuk Penyandang Disabilitas

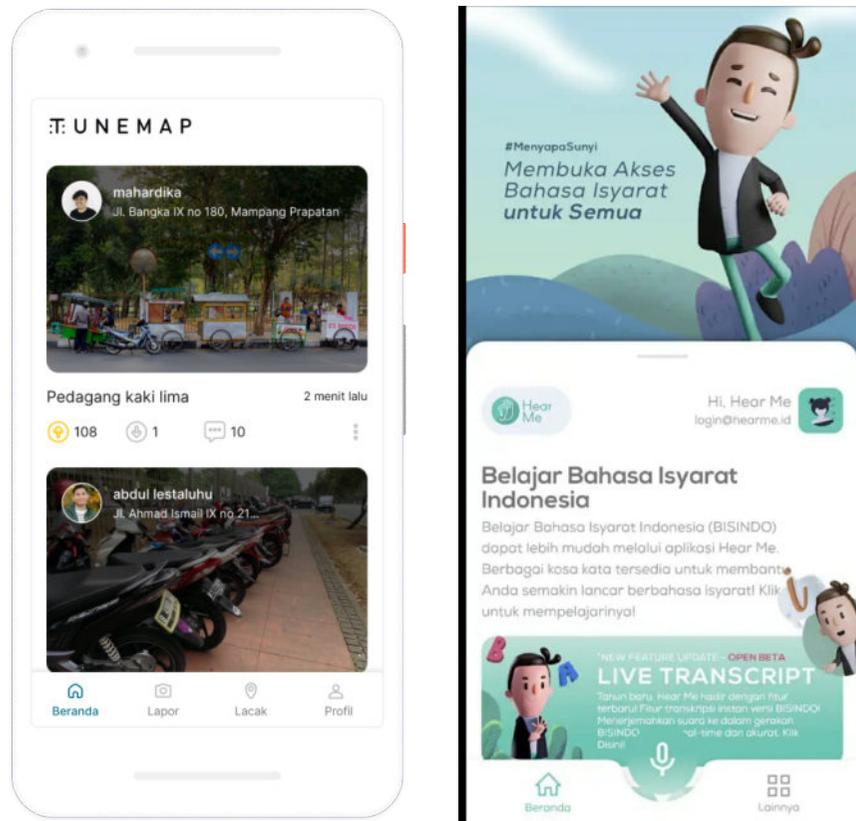
Dewasa ini, kemajuan teknologi memicu perkembangan lahirnya berbagai macam aplikasi yang semakin akrab dengan kehidupan kita, baik untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, hiburan, transportasi, ataupun dalam pengurangan risiko bencana. Aplikasi/platform daring yang dibuat di bidang kebencanaan pun semakin beragam dan luas peruntukannya. Namun belum banyak platform daring terkait kebencanaan/ ketangguhan yang didesain dengan memerhatikan konteks kebutuhan penyandang disabilitas dan fitur aksesibilitasnya. SIPAKDEDIFA (Sistem Pembelajaran Kebencanaan dengan E-Learning untuk Difabel) merupakan inovasi yang dikembangkan BPBD Kabupaten Klaten untuk pembelajaran kebencanaan bagi penyandang disabilitas. Di dalamnya terdapat materi kebencanaan yang dapat disesuaikan dengan kemudahan pengguna, misalnya materi dengan format visual/video dapat dinikmati teman Tuli, dan materi audio dapat dinikmati teman Netra.

Di samping itu, terdapat pula Kerjabilitas.com, yang menjawab tantangan sulitnya mencari kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Platform ini menjadi penghubung antara pencari kerja dan penyedia kerja yang menerima penyandang disabilitas. Dengan sistem informasi ini, penyandang disabilitas bisa menempatkan profil mereka sebagai pencari kerja dan mengakses informasi tentang kesempatan kerja yang tersedia untuk mereka. Platform ini tidak terbatas di satu wilayah saja namun dapat dimanfaatkan secara nasional. Pada platform kerjabilitas.com, penyandang disabilitas tidak hanya dapat mencari pekerjaan agar mempunyai ketangguhan finansial, namun juga bisa menyuarakan opini-opini mereka dalam forum komunikasi terkait isu-isu lain di sekitarnya.



Gambar 9. Homepage kerjabilitas.com dan SIPAKDEDIFA.

Aplikasi lainnya yang mengakomodasi kebutuhan berbagai penyandang disabilitas namun tidak berfokus kebencanaan telah diinisiasi, semisal Hear Me, sebuah aplikasi bahasa isyarat untuk Teman Tuli dan Teman Dengar karya Mahasiswa SBM ITB, serta TuneMap, sebuah aplikasi peta berbasis udunan dari masyarakat untuk menavigasi tuna netra di lingkungan perkotaan. Karya-karya tersebut rilis beberapa tahun silam dan berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana bagi penyandang disabilitas dalam berbagai fase manajemen kebencanaan.



Gambar 10.
Aplikasi TuneMap dan Hear Me

Panduan Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Kegiatan Kemanusiaan

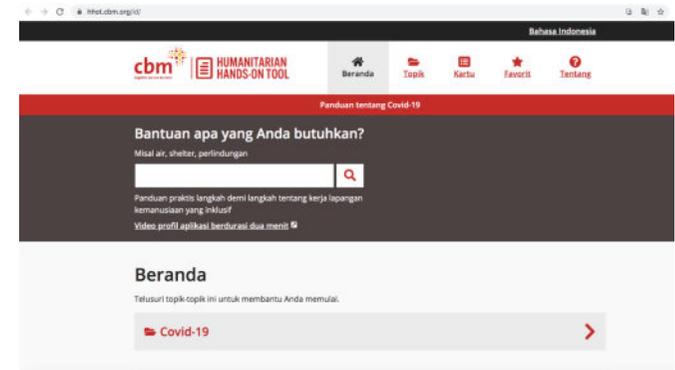


Panduan Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Kegiatan Kemanusiaan

Panduan yang dimaksud dalam bab ini yaitu kumpulan informasi untuk memberikan arahan atau tata cara dalam melakukan kegiatan kemanusiaan, khususnya pengurangan risiko bencana, dengan penerima manfaat dan pelaku kegiatan penyandang disabilitas. Panduan ini diperlukan untuk mempermudah berbagai pekerja kemanusiaan dalam bekerja, terutama mereka yang belum biasa melibatkan penyandang disabilitas. Sebagai ilustrasi, beberapa panduan yang sudah ada saat ini yaitu Humanitarian Hands-on Tools (HHOT), Panduan Praktis Penelitian Bersama Penyandang Disabilitas, dan Panduan Menghadapi COVID-19 bagi tiap Ragam Disabilitas. Humanitarian Hands-on Tools (HHOT) merupakan panduan praktis aksi kemanusiaan, terutama tanggap darurat, agar aksesibel dan inklusif bagi orang dengan disabilitas. Panduan ini dikembangkan oleh CBM, didukung BNPB dan YEU pada tahun 2019.

Panduan ini memuat cara memastikan orang dengan disabilitas dapat mengakses semua layanan tanggap darurat dengan bermartabat, dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan program tanggap darurat. Setelah diunduh, HHOT dapat digunakan tanpa jaringan internet.

Formulasi Panduan Praktis Penelitian Bersama Penyandang Disabilitas dilakukan berdasarkan pembelajaran penelitian partisipatoris tentang WASH inklusif dalam respon kemanusiaan yang dilakukan oleh tiga lembaga, yaitu ASB, Pokja OPDis Pasigala, dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM) pada tahun 2020-2021 selama 18 bulan di Kabupaten Sigi, Donggala dan Kota Palu. Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas yang telah dilatih diharapkan mampu mahir menjadi peneliti bidang kemanusiaan, agar dapat turut serta merencanakan, melaksanakan dan melakukan pemantauan. Kegiatan ini dapat menambah kapasitas bagi penyandang disabilitas dan dapat memberikan hasil yang maksimal yang menyoal pada terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri.



Gambar 11. Humanitarian Hands-on Tools (HHOT)

Panduan Menghadapi COVID-19 bagi tiap Ragam Disabilitas merupakan buku infografik dan video untuk melindungi penyandang disabilitas dari COVID-19. Dari sekian banyak informasi tentang covid-19 yang telah beredar, masih banyak yang tidak aksesibel dan tepat bagi penyandang disabilitas. Panduan ini disusun oleh Sapda dan Disability Rights Fund bersama komunitas disabilitas, pegiat media, pelaku seni, production house “Santoso Menyenangkan”, dan DPO Respon Covid-19.

Pemanfaatan panduan tersebut sejauh ini, yaitu panduan telah: (1) dipergunakan oleh gugus tugas COVID-19 DIY sebagai salah satu panduan penanganan ; (2) diadaptasi oleh Lakpesdam PBNU sebagai salah satu materinya ; (3) dimasukkan ke dalam inventory COVID-19 yang dikelola oleh *subcluster* shelter nasional; (4) dimuat oleh kanal berita Tribun Jogja.; (5) dikemas ulang dalam bentuk poster untuk memberikan variasi format visual sekaligus memberikan kemudahan bagi yang kesulitan memahami informasi dalam bentuk kalimat-kalimat panjang; (6) diadaptasikan ke dalam beberapa protokol yang dibuat oleh Kementerian PPPA. Selain itu, video Panduan Menghadapi Covid-19 Bagi Tiap Ragam Disabilitas yang telah dipublikasikan melalui channel youtube, akun Instagram akun Facebook dan Twitter SAPDA telah mendapatkan respon sebanyak kurang lebih 200 view (per Mei 2020).



Pihak yang Berperan

Berikut ini adalah gambaran pihak yang menginisiasi dan mengelola berbagai program/gerakan/alat pengurangan risiko bencana yang inklusif yang telah dijabarkan dalam bab ini. Sebagai catatan, dalam pengembangan inovasinya, setiap pihak tersebut berkolaborasi satu sama lain maupun dengan pihak yang mungkin tidak teridentifikasi dalam sumber informasi laporan ini. Oleh karenanya, pemetaan parapihak ini hanya menyebutkan kategori beserta contoh pihak yang teridentifikasi dalam laporan ini saja.

Sektor Publik

Pemkot
(mis. Banjarmasin, Klaten)

Pemprov
(mis. DIY, Jateng)

Kementerian
(mis. PUPR, BNPB)

Organisasi PBB
(mis. UNESCO)

Masyarakat/ Komunitas

Organisasi masyarakat (mis. komunitas disabilitas, DPO Respon COVID-19, RW/ kelurahan)

Individu
(pegiat media, pelaku seni, aktivis)

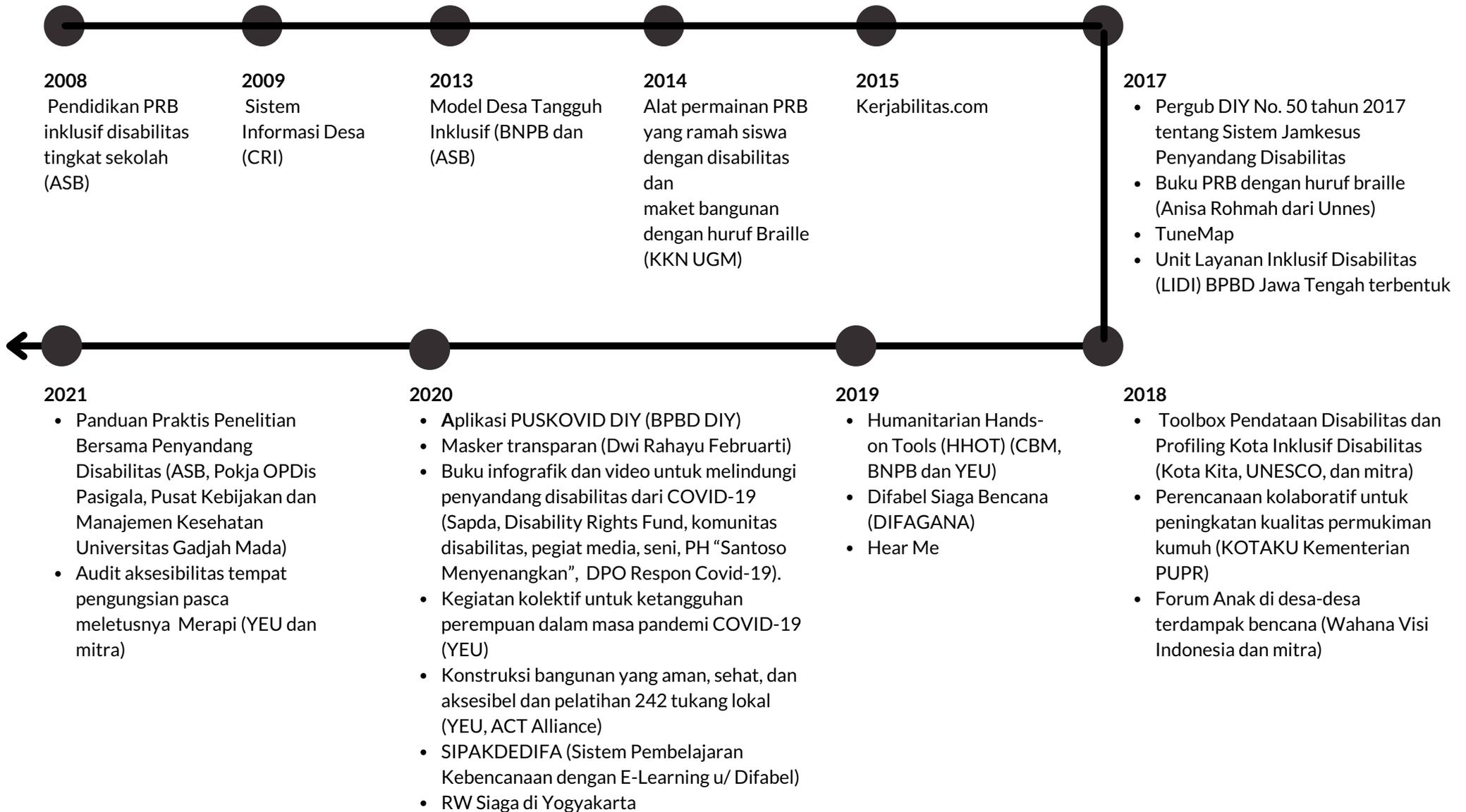
Institusi Non Pemerintahan

Swasta (mis. production house 'Santoso Menyenangkan')

Akademia (mis. mahasiswa, pusat studi, di UGM, Unnes, ITB)

LSM
(mis. WVI, CRI, Kota Kita, YEU, ASB, Kaki Kota, Sapda, CBM, ACT Alliance)

Perjalanan Waktu Pengembangan Inovasi PRB Inklusif



Referensi

Buku/Panduan/Laporan

1. ASB Indonesia and the Philippines. (2021). *Panduan Praktis Penelitian bersama Penyandang Disabilitas: Refleksi dan pembelajaran penelitian partisipatoris tentang WASH Inklusif dalam respons kemanusiaan*. Sleman: Abeiter-Samariter-Bund
2. ASB Indonesia dan Philippines. (2016). *Newsletter Vol 1 2016*. Sleman: Abeiter-Samariter-Bund
3. Asterina, Nina dan Hasanatun Nisa Thamrin. (2019). *Toolbox of Practices and Program Ideas: Disability-Inclusive City Banjarmasin*. Jakarta : UNESCO
4. Asterina, Nina dkk. (2019). *Banjarmasin City: Disability-Inclusive City Profile*. Jakarta : UNESCO
5. Margaretha, Melina. *Disabilitas Dalam Ketangguhan: Berangkat Dari Sumberdaya Yang Belum Termanfaatkan*. Sleman: Abeiter-Samariter-Bund
6. Rohmah, Anisa. (2017). *Penyusunan Buku Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Braille Sebagai Pengetahuan Awal Mitigasi Bencana Alam Bagi Siswa Tunanetra di SLB Negeri Semarang*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
7. Septiani, Amelia dkk. (2020). *Advokasi Kebijakan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak*. Tangerang Selatan: Wahana Visi Indonesia

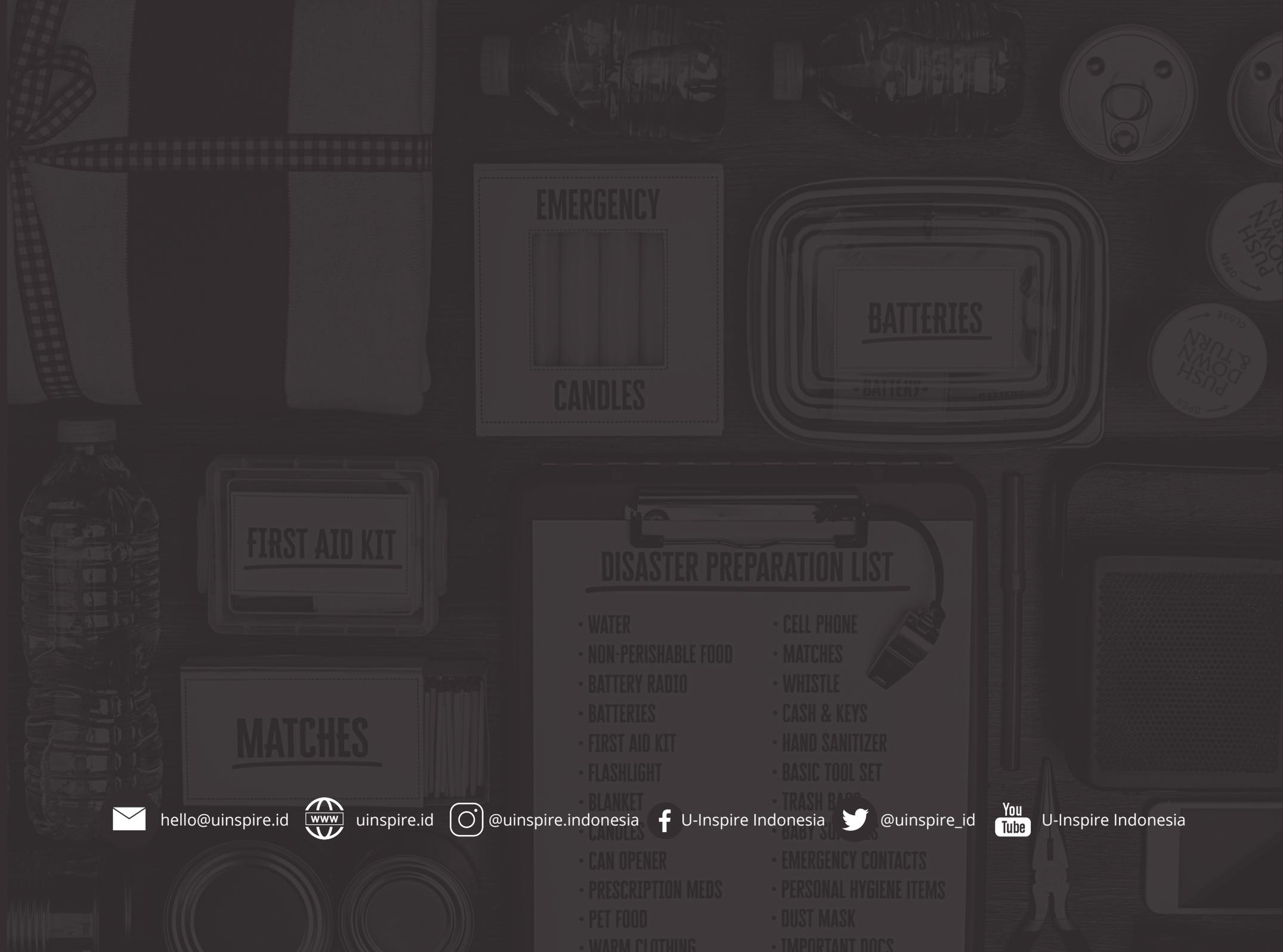
Aplikasi

1. Hear Me : <https://hear.me/id/en>
2. HHOT: <https://hhot.cbm.org/id/>
3. Kerjabilias : <https://kerjabilias.com/>
4. SIPAKDEDIFA: <http://sipakdedifa.com/>
5. Tune Map: <https://tunemap.org/>

Referensi

Artikel

1. Abeiter-Samariter-Bund. (2021). *Ketangguhan Perempuan di Kota Yogyakarta dalam masa pandemi COVID-19*. Diakses pada 19 Juli 2021
2. ACT Indonesia Forum. (2020). *Siaran Pers: Pendekatan Inklusi dalam Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah*. Diakses pada 19 Juli 2021
3. Amindoni, Ayomi. (2020). *Virus corona: Perempuan difabel di Yogyakarta ciptakan masker transparan untuk tunarungu*. Diakses pada 19 Juli 2021
4. BPBD DIY. (2020). *Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19*. Diakses pada 19 Juli 2021
5. Dinas Sosial DIY. (2019). *Penguatan DIFAGANA*. Diakses pada 19 Juli 2021.
6. Gusti. (2014). *Mahasiswa UGM Beri Pendidikan Bencana Bagi Anak-Anak di Pulau Kei dan Sabang*. Diakses pada 19 Juli 2021.
7. Kelurahan Pendowoharjo. *Program Jamkesmas Terpadu, Layanan Khusus Bagi Difabel*. Diakses pada 19 Juli 2021
8. Pemerintah DIY. (2020). *Panduan Menghadapi Covid-19 Tiap Ragam Disabilitas*. Diakses pada 19 Juli 2021.
9. Pemerintah Kabupaten Sleman. (2016). *Peresmian Sistem Informasi Desa (SID)*. Diakses pada 19 Juli 2021.
10. Subarkah, Lugas. (2020). *Jadi Pelopor RW Siaga di Kota Jogja, Ini Inovasi yang Dilakukan Warga Purwokinanti*. Diakses pada 19 Juli 2021.
11. Yakkum Emergency Unit. (2020). *YEU bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi DIY dan DIFAGANA (Difabel Siaga Bencana) dan didukung oleh CBM*. Diakses pada 19 Juli 2021.



EMERGENCY
CANDLES

BATTERIES

FIRST AID KIT

MATCHES

- DISASTER PREPARATION LIST**
- WATER
 - NON-PERISHABLE FOOD
 - BATTERY RADIO
 - BATTERIES
 - FIRST AID KIT
 - FLASHLIGHT
 - BLANKET
 - CANDLE
 - CAN OPENER
 - PRESCRIPTION MEDS
 - PET FOOD
 - WARM CLOTHING
 - CELL PHONE
 - MATCHES
 - WHISTLE
 - CASH & KEYS
 - HAND SANITIZER
 - BASIC TOOL SET
 - TRASH BAGS
 - BABY SUPPLIES
 - EMERGENCY CONTACTS
 - PERSONAL HYGIENE ITEMS
 - DUST MASK
 - IMPORTANT DOC'S



hello@uinspire.id



uinspire.id



@uinspire.indonesia



U-Inspire Indonesia



@uinspire_id



U-Inspire Indonesia